BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama dalam pembangunan yang bersifat kompleks, multidimensional, dan dinamis seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, serta politik (Putri et al., 2024). Namun demikian, dalam praktik kebijakan publik, kemiskinan tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan ekonomi, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara struktur sosial, tata kelola pemerintahan, dan implementasi kebijakan (Puente De La Vega Caceres et al., 2024). Ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh kualitas data sosial ekonomi masyarakat, khususnya dari aspek akurasi, keterpaduan, dan kemutakhiran, karena data tersebut menjadi landasan utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan (Linhares et al., 2026). Ketika basis data tidak sinkron atau tidak responsif terhadap dinamika sosial, maka intervensi kebijakan berisiko menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan inefisiensi (Knill et al., 2021).

Secara global, kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan yang mendapat perhatian serius dari berbagai negara dan organisasi internasional (Klimczuk et al., 2024). World Bank (2023) mencatat bahwa meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan global dalam beberapa dekade terakhir, pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan

ekonomi global telah menyebabkan peningkatan kerentanan sosial di berbagai negara berkembang (World Bank, 2023). Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)* menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama *(Goal 1 : No Poverty)*. Hal ini menegaskan pentingnya tata kelola kebijakan yang berbasis data sosial ekonomi yang akurat dan berkelanjutan ((OPHI) & (UNDP), 2025). Konteks global tersebut kemudian tercermin dalam kondisi nasional dan daerah sebagaimana digambarkan berikut :

GAMBAR 1

ALUR KONTEKS PERMASALAHAN KEMISKINAN

(Sumber : ((OPHI) & (UNDP), 2025; Badan Pusat Statistik(BPS -Statistics Indonesia), 2025; World Bank, 2023)

Dari gambar di atas diketahui bahwa dalam konteks nasional, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), jumlah penduduk miskin

Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 23,85 juta jiwa atau 8,47% dari total penduduk, dengan garis kemiskinan Rp609.106 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia), 2025). Meskipun mengalami tren penurunan, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan besaran angka kemiskinan, tetapi juga dengan integrasi dan validitas data sebagai dasar intervensi kebijakan di tingkat daerah (Manalu & Estperditja, 2025). Disparitas antarwilayah menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lokal (Kasmiati, 2021). Kondisi tersebut juga terlihat di Kabupaten Bojonegoro. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun demikian, pada tahun 2025 Kabupaten Bojonegoro masih menempati peringkat ke-11 tingkat kemiskinan tertinggi dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur (BPS Bojonegoro, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa penurunannya belum sepenuhnya mencerminkan implementasi kebijakan secara struktural.

TABEL 1

DATA JUMLAH KEMISKINAN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Kemiskinan (jiwa)	%
1	2021	166.520	13,27%
2	2022	153.400	12,21%
3	2023	153.250	12,18%
4	2024	147.330	11,69%
5	2025	144.900	11,49%

Sumber : (BPS Bojonegoro, 2025)

Berdasarkan tabel 1, Data Jumlah Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2025, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren penurunan secara bertahap dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 166.520 jiwa atau sekitar 13,27% dari total penduduk. Kemudian pada tahun 2022, jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 153.400 jiwa atau 12,21%, yang berarti terjadi pengurangan sekitar 13.120 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 153.250 jiwa atau 12,18%.

Penurunan pada tahun ini relatif kecil dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, angka kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi 147.330 jiwa atau 11,69%. Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah mulai memberikan dampak yang lebih

nyata. Terakhir, pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 144.900 jiwa atau sekitar 11,49%. Angka ini merupakan tingkat kemiskinan terendah dalam periode 2021–2025.

Data kemiskinan Kabupaten Bojonegoro bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dikutip dalam rilis resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Data tersebut disajikan dalam bentuk jumlah penduduk miskin (jiwa) dan persentase kemiskinan. Persentase kemiskinan diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk Kabupaten Bojonegoro pada periode pengukuran, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Sebagai contoh, jumlah penduduk miskin sebanyak 144.900 jiwa pada tahun 2025 setara dengan 11,49% dari total penduduk Kabupaten Bojonegoro.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan secara konsisten dari tahun 2021 hingga tahun 2025, yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta adanya upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Secara struktural, kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh ketergantungan pada sektor pertanian musiman yang menyebabkan tingginya kerentanan pendapatan rumah tangga. Ketergantungan tersebut diperparah oleh keterbatasan lapangan kerja alternatif di sektor nonpertanian serta ketimpangan akses terhadap layanan dasar antarwilayah desa dan kecamatan (Halo Bojonegoro, 2026).

Namun persoalan tersebut tidak hanya terletak pada faktor ekonomi saja, melainkan juga pada tata kelola data kemiskinan yang belum sepenuhnya terintegrasi (Arik.T.P, 2025). Namun demikian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro mengungkapkan bahwa pemanfaatan data kemiskinan masih menghadapi berbagai kendala.

GAMBAR 2

PROBLEMATIKA SISTEM DATA KEMISKINAN DAERAH

(Sumber : Bappeda Bojonegoro, 2025)

Dari gambar di atas, sejak tahun 2021 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak lagi memuat indikator rumah tangga secara rinci. Sementara itu, data BPS bersifat makro dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan intervensi kebijakan tingkat mikro, ketidaksinkronan data antarinstansi tersebut berpotensi menimbulkan *exclusion error* (masyarakat miskin tidak terdata) dan *inclusion error* (masyarakat tidak miskin justru menerima bantuan) (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2022; SuaraBojonegoro.com, 2022).

Dengan demikian, persoalan utama yang dihadapi bukan sekadar tingginya angka kemiskinan, tetapi bagaimana memastikan sistem pendataan mampu menjadi instrumen kebijakan yang akurat dan responsif (Atika, 2025).

Permasalahan serupa juga dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro. Meskipun angka kemiskinan di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam menyediakan data kemiskinan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Selama ini, data kemiskinan berasal dari berbagai sumber, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Badan Pusat Statistik (BPS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Perbedaan tujuan, karakteristik, dan metode pengumpulan data pada masing-masing basis data menyebabkan masih ditemukannya ketidaksinkronan informasi sehingga berpotensi menimbulkan *inclusion error* maupun *exclusion error*. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya suatu sistem pendataan yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih aktual sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Sebagai respons terhadap berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengembangkan inovasi Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) sebagai sistem pendataan kemiskinan berbasis daerah. DAMISDA merupakan inovasi kebijakan yang dirancang untuk menghasilkan basis data kemiskinan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pengembangan DAMISDA juga menjadi bentuk implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor

4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mendorong pemerintah daerah memperkuat kualitas data sebagai dasar intervensi kebijakan.

Pelaksanaan DAMISDA memiliki landasan hukum yang jelas. Basis awal data masyarakat miskin ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/3125.1/KEP/412.302/2022 tentang Penetapan Data Masyarakat Miskin Daerah. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/54/KEP/412.013/2024 tentang Tim Sensus Masyarakat Miskin Daerah Kabupaten Bojonegoro. Keputusan tersebut menjadi dasar pembentukan Tim Sensus yang bertugas melaksanakan pendataan, verifikasi, validasi, serta pemutakhiran data masyarakat miskin secara berkala dan terkoordinasi. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pendataan yang lebih sistematis dan mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual.

Tujuan utama DAMISDA adalah menyediakan basis data kemiskinan yang tidak hanya akurat dan mutakhir, tetapi juga terintegrasi antarsektor sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program, penganggaran, penetapan sasaran bantuan sosial, serta evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Melalui mekanisme pemutakhiran data secara berkala, DAMISDA diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah dan meminimalkan

terjadinya *inclusion error* maupun *exclusion error*.

Berdasarkan hasil pemutakhiran Semester II Tahun 2024, basis data DAMISDA yang digunakan pada tahun 2025 mencatat sebanyak 54.016 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 145.521 jiwa sebagai sasaran berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Data tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan berbagai program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), antara lain program jaminan kesehatan, bantuan pangan, santunan duka BPJS Ketenagakerjaan, serta bantuan ternak. Pemanfaatan data *by name by address* tersebut menunjukkan bahwa DAMISDA tidak lagi hanya berfungsi sebagai basis data administratif, tetapi telah menjadi instrumen kebijakan publik yang mendukung ketepatan sasaran berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Dalam implementasinya, DAMISDA dilaksanakan melalui koordinasi berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, operator aplikasi, dan pencacah lapangan yang memiliki tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi DAMISDA tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem pendataan, tetapi juga oleh implementasi koordinasi, komunikasi, serta sinergi antarorganisasi dalam menjalankan setiap tahapan pendataan. Struktur koordinasi pelaksanaan DAMISDA di Kabupaten Bojonegoro disajikan pada gambar berikut:

GAMBAR 3

STRUKTUR KOORDINASI DAN PENGELOLAAN DAMISDA DI KABUPATEN BOJONEGORO

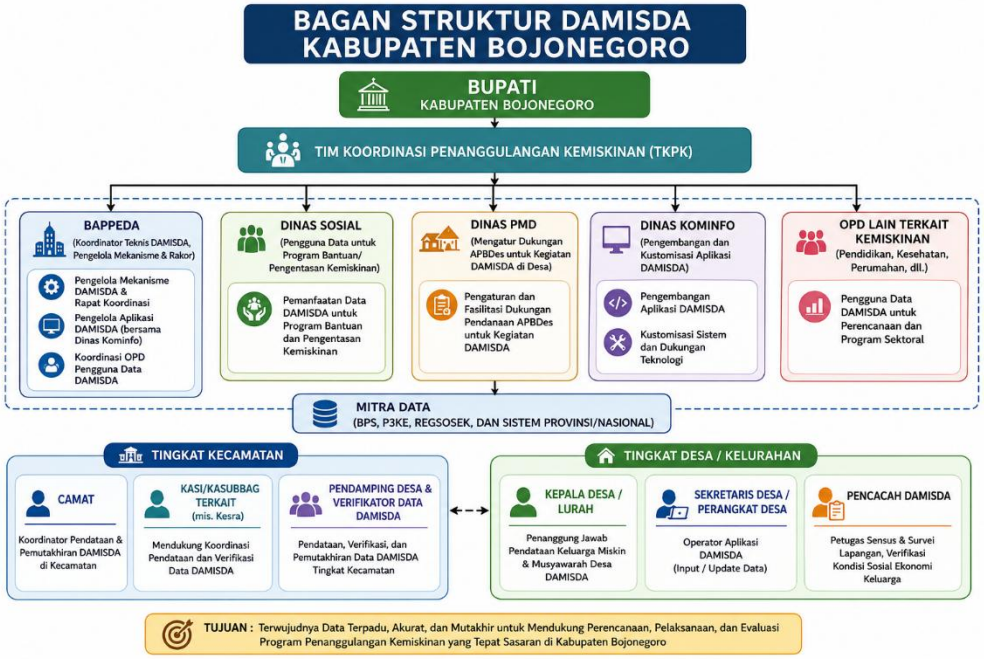

Sumber : (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2022)

Berdasarkan struktur koordinasi pelaksanaan DAMISDA di Kabupaten Bojonegoro, implementasi kebijakan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Pada tingkat kabupaten, Bupati bertindak sebagai penanggung jawab kebijakan yang didukung oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program penanggulangan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan teknis, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan sebagai koordinator utama yang bertanggung jawab menyusun mekanisme pelaksanaan, mengoordinasikan perangkat

daerah, serta mengelola sistem DAMISDA bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Selanjutnya, Dinas Sosial memanfaatkan data DAMISDA sebagai dasar penetapan sasaran berbagai program bantuan sosial, sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mendukung pelaksanaan pendataan di tingkat desa melalui pembinaan pemerintah desa.

Pada tingkat kecamatan, camat berperan mengoordinasikan pelaksanaan pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sementara itu, di tingkat desa, kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pendataan dengan melibatkan perangkat desa, operator aplikasi, dan pencacah lapangan. Operator bertugas mengelola serta menginput data ke dalam aplikasi DAMISDA, sedangkan pencacah melakukan pendataan dan verifikasi kondisi masyarakat secara langsung di lapangan.

Selain melibatkan perangkat daerah dan pemerintah desa, implementasi DAMISDA juga didukung oleh integrasi berbagai sumber data, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), data Badan Pusat Statistik (BPS), serta data administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Integrasi tersebut bertujuan meningkatkan validitas dan akurasi data sehingga mampu meminimalkan terjadinya *inclusion error* maupun *exclusion error* dalam penetapan sasaran program.

Struktur koordinasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi DAMISDA merupakan kebijakan yang melibatkan banyak aktor dengan fungsi dan kewenangan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi atau sistem pendataan, tetapi juga dipengaruhi oleh implementasi koordinasi, komunikasi, pembagian tugas, serta komitmen setiap organisasi pelaksana dalam menjalankan tanggung jawabnya. Apabila koordinasi antarlembaga berjalan dengan baik, proses pendataan, verifikasi, validasi, pemutakhiran, hingga pemanfaatan data dapat terlaksana secara optimal sehingga menghasilkan basis data kemiskinan yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro (Lukito et al., 2024).

Dengan pendekatan partisipatif berbasis data desa, DAMISDA diharapkan mampu menjawab keterbatasan sistem pendataan sebelumnya dan memperkuat tata kelola kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2024).

Namun dalam implementasinya, Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia desa, koordinasi lintas organisasi yang belum optimal, serta integrasi data antar-OPD yang masih memerlukan penyempurnaan (Pemkab Bojonegoro, 2024). Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi

pelaksana, dan struktur birokrasi (Hidayat et al., 2024). Kondisi empiris tersebut menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara tujuan normatif DAMISDA dan realitas implementasinya di lapangan.

Meskipun DAMISDA telah dimanfaatkan sebagai basis data dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi implementasi pelaksanaan kebijakan. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan DAMISDA tidak hanya ditentukan oleh kualitas data yang dihasilkan, tetapi juga oleh proses implementasi yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta mekanisme koordinasi. Berdasarkan hasil observasi awal, studi dokumentasi, dan informasi yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terdapat beberapa fenomena yang menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian ini.

1. Masih terdapat kendala pada aspek sumber daya teknis dalam pelaksanaan DAMISDA. Proses pendataan dan pemutakhiran data masih menghadapi hambatan, seperti gangguan server aplikasi ketika diakses secara bersamaan oleh operator serta kendala sistem dalam membaca titik koordinat lokasi secara otomatis. Kondisi tersebut menyebabkan penginputan data menjadi terlambat dan sebagian data masih memerlukan verifikasi ulang di lapangan, sehingga menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi masih perlu ditingkatkan.

2. Penyampaian informasi mengenai DAMISDA kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal. Sosialisasi dan bimbingan teknis telah dilaksanakan kepada pemerintah desa, operator, dan pencacah, namun belum seluruh masyarakat memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat DAMISDA. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui alasan pendataan maupun prosedur pemutakhiran data, sehingga dapat memengaruhi partisipasi dan kualitas data yang dihasilkan.
3. Implementasi DAMISDA memerlukan koordinasi yang berkelanjutan antarorganisasi pelaksana. Pelaksanaan DAMISDA melibatkan berbagai instansi, mulai dari Bappeda, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga operator dan pencacah lapangan. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi yang konsisten diperlukan agar proses pendataan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data dapat berjalan efektif serta menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penanggulangan kemiskinan..

Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi DAMISDA tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi sebagai media pendataan, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh organisasi pelaksana dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala implementasi DAMISDA sehingga dapat diketahui aspek-aspek yang perlu

diperkuat dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya, untuk memperkuat urgensi penelitian, perlu ditinjau hasil-hasil penelitian terdahulu sehingga dapat diketahui posisi penelitian ini, kesenjangan penelitian (*research gap*), serta kontribusi yang ditawarkan dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu pendataan kemiskinan dan kebijakan sosial telah banyak dikaji, baik dalam konteks transformasi digital, koordinasi kelembagaan, maupun implementasi distribusi bantuan sosial. Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih memiliki keterbatasan konseptual dan analitis.

Penelitian oleh (Widjaja & Dhanudibroto, 2025) menyoroti inovasi digital pengelolaan data kemiskinan, tetapi fokusnya masih pada aspek koordinasi dan kinerja sistem, sehingga belum menguraikan variabel implementasi kebijakan secara mendalam. Studi (Lukito et al., 2024) yang secara langsung meneliti DAMISDA di Bojonegoro juga masih berorientasi pada pengukuran implementasi aplikasi *(outcome-oriented)*, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mengungkap secara komprehensif dinamika komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, disposisi pelaksana, serta konfigurasi struktur birokrasi dalam praktik implementasi.

Penelitian lain seperti (Pertiwi et al., 2025) dan (Atika, 2025) menegaskan pentingnya akurasi data dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, tetapi keduanya berada pada level makro dan tidak menelaah

mekanisme implementasi pendataan berbasis desa. Sementara itu (Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Jln, 2018) masih bersifat normatif dan belum menguji bagaimana perilaku implementor, konfigurasi struktur birokrasi, serta fragmentasi kewenangan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pendataan kemiskinan.

Dengan demikian, terdapat kekosongan analitis *(analytical gap)* pada irisan antara inovasi pendataan kemiskinan berbasis desa, implementasi kebijakan publik di tingkat daerah, dan penggunaan kerangka teori implementasi kebijakan yang operasional untuk menjelaskan dinamika aktor pelaksana. Sebagian besar studi terdahulu berhenti pada level evaluasi implementasi sistem *(policy outcome)* atau aspek teknis digitalisasi, sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana kebijakan pendataan kemiskinan benar-benar diimplementasikan dalam praktik birokrasi daerah, terutama pada konteks inovasi daerah seperti Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah di Kabupaten Bojonegoro tahun 2025.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain normatif maupun kecanggihan sistem yang dibangun, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor implementatif dalam birokrasi. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Komunikasi berkaitan dengan kejelasan penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, informasi, serta sarana pendukung yang memadai. Disposisi pelaksana merujuk pada sikap, komitmen, dan kemauan aparatur dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme koordinasi organisasi serta prosedur yang mengatur hubungan antar aktor pelaksana kebijakan.

Keempat variabel tersebut dipilih karena relevan dengan fenomena implementasi DAMISDA yang melibatkan banyak organisasi pelaksana, penggunaan sistem informasi, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan data sebagai dasar penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, teori implementasi kebijakan George C. Edward III dinilai mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi DAMISDA di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam implementasi program Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) di Kabupaten Bojonegoro, keempat variabel implementasi kebijakan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis berbagai dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan, antara lain sebagai berikut:

1. Komunikasi menjadi faktor penting dalam implementasi DAMISDA. Informasi mengenai tujuan, prosedur, dan mekanisme pendataan harus disampaikan secara jelas kepada pemerintah desa dan operator agar

tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam proses verifikasi dan validasi data masyarakat miskin.

2. Sumber daya memengaruhi kelancaran pelaksanaan DAMISDA. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, kemampuan teknis operator, serta dukungan sarana seperti komputer dan jaringan internet menjadi faktor penting dalam pengelolaan data kemiskinan.
3. Disposisi (sikap pelaksana) berpengaruh terhadap keberhasilan program. Komitmen, integritas, dan objektivitas pelaksana diperlukan agar proses verifikasi dan validasi data berjalan secara tepat sehingga sasaran program tidak mengalami kekeliruan.
4. Struktur birokrasi memerlukan koordinasi yang baik antarlembaga pelaksana. Pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang efektif akan mendukung kelancaran proses pendataan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data kemiskinan.

Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) melalui perspektif teori implementasi kebijakan diperlukan untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif sebagai instrumen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

Analisis penelitian ini menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam konteks Kabupaten Bojonegoro 2025.

Dengan demikian, kebaruan *(novelty)* penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap proses implementasi inovasi pendataan kemiskinan berbasis desa dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, yang belum banyak dikaji secara sistematis dalam literatur sebelumnya. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti mengangkat judul tentang Implementasi Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) sebagai Instrumen Kebijakan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2025.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan tahap penting dalam proses penelitian karena menjadi dasar dalam menentukan arah dan fokus penelitian. Menurut (Tuckman, 1999), Rumusan masalah adalah proses mengidentifikasi serta menyatakan secara jelas persoalan penelitian yang muncul akibat adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, masalah penelitian perlu dirumuskan secara sistematis dan spesifik agar dapat diteliti secara ilmiah serta memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup penelitian.

Sejalan dengan hal tersebut, (Sugiyono, 2023) menyatakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian umumnya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui proses pengumpulan dan analisis data.

Berdasarkan teori tentang rumusan masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana

Implementasi Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) Sebagai Instrumen Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro?"

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2023), tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menunjukkan arah dan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian, yang disusun berdasarkan rumusan masalah agar penelitian memiliki fokus yang jelas dan terukur.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah, "Untuk Menganalisis Implementasi Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) Sebagai Instrumen Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro".

2. Kegunaan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2023), kegunaan penelitian adalah uraian mengenai manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, baik secara teoretis maupun praktis. Bagian ini menjelaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta pemecahan masalah nyata di lapangan. Dengan merumuskan kegunaan penelitian secara jelas, peneliti menunjukkan relevansi dan nilai penting penelitiannya bagi berbagai pihak. Maka diharap penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya kajian mengenai implementasi kebijakan publik dan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis data. Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang penerapan teori implementasi kebijakan publik, terutama model implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademik mengenai inovasi kebijakan daerah dalam pengelolaan data kemiskinan yang melibatkan peran aktif pemerintah desa, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kebijakan publik berbasis data dan tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif dan responsif.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan implementasi Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kendala implementasi kebijakan serta merumuskan langkah perbaikan kebijakan berbasis data yang lebih akurat,

terintegrasi, dan berkelanjutan.

2) Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi OPD yang terlibat dalam pendataan dan penanggulangan kemiskinan, seperti Bappeda, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa, dalam meningkatkan koordinasi, sinkronisasi data, serta pemanfaatan DAMISDA sebagai dasar perencanaan program dan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan efisien.

3) Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai pentingnya peran desa dalam proses pendataan masyarakat miskin, mulai dari pengumpulan, verifikasi, hingga pemutakhiran data. Dengan demikian, pemerintah desa dapat berperan lebih optimal dalam mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada kondisi riil masyarakat di tingkat lokal.

4) Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi empiris dan teoretis bagi peneliti atau akademisi yang tertarik mengkaji implementasi kebijakan publik, inovasi kebijakan daerah, serta sistem pendataan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat dan pemerintah desa.

5) Bagi Masyarakat

Secara tidak langsung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Melalui perbaikan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan sosial

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merupakan pokok-pokok yang disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah mengenai alur pembahasan penelitian, sehingga memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dan substansi penelitian secara keseluruhan.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan isi berupa latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memahami konteks dan urgensi penelitian mengenai implementasi Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dalam penelitian dan juga adapun pada bab ini bertujuan untuk memperkuat analisis penelitian secara teoritis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, informan, teknik pengumpulan data, manajemen data, serta teknik analisis data. Bab ini bertujuan menjelaskan secara sistematis proses penelitian agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai implementasi Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2025. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori yang digunakan serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasinya.

5. BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk meningkatkan implementasi Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.